



Analisis Peran Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Arifahtul Hikmah^{1*}, Halimah², Syalaisha Sevia Aulianisya³, Mohammad Ridwan⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: arifahtulhkmh@gmail.com^{1*}, halimahimah369@gmail.com², syalaishas642@gmail.com³, ridwanciperna@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi : arifahtulhkmh@gmail.com

Abstract. Fiscal policy is one of the government's main instruments in managing the national economy through the regulation of state revenue and expenditure in order to achieve economic stability, growth, and equitable social welfare. This study aims to analyze the role of fiscal policy in improving social welfare through various development programs, income distribution, and public service provision. The method used is a descriptive qualitative approach by analyzing various literature sources, government policies, and data related to fiscal implementation. The results show that fiscal policy has a strategic role in improving social welfare through tax management, subsidies, social assistance, infrastructure development, education, and healthcare. Effective fiscal policy can reduce social inequality, increase people's purchasing power, create employment opportunities, and strengthen national economic stability. However, the effectiveness of fiscal policy is also influenced by budget management transparency, accurate program targeting, and the level of public compliance with tax obligations. Therefore, synergy between the government and society is essential so that fiscal policy can be implemented optimally in achieving social justice and equitable welfare. This study emphasizes that fiscal policy is not only an economic tool but also an important means of creating sustainable development and social welfare for all levels of society.

Keywords: Economic Equity; Fiscal Policy; National Development; Social Welfare; Taxation.

Abstrak. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian negara melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, serta pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program pembangunan, distribusi pendapatan, dan penyediaan layanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis berbagai literatur, kebijakan pemerintah, serta data terkait implementasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pajak, subsidi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal yang efektif mampu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Namun, efektivitas kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan anggaran, ketepatan sasaran program, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan fiskal dapat berjalan optimal dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga sarana penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal; Kesejahteraan Sosial; Pajak; Pembangunan Nasional; Pemerataan Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan cita-cita utama setiap negara dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks pembangunan nasional, kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, serta akses terhadap pelayanan publik yang layak. Pemerintah sebagai pengelola negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati hasil pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai kebijakan strategis yang mampu mengatur dan mengarahkan perekonomian nasional secara efektif, salah satunya adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara dan pengeluaran negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini digunakan sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi, serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan (Rahyono, 2023). Dalam praktiknya, kebijakan fiskal diwujudkan melalui pengelolaan pajak, subsidi, transfer sosial, bantuan langsung, serta pembiayaan pembangunan di berbagai sektor strategis. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara memiliki peranan vital dalam membiayai program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Dalam sistem perekonomian modern, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi sosial. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah melalui sistem pajak progresif, subsidi kebutuhan pokok, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, serta program perlindungan sosial lainnya (Rahyono, 2023). Misalnya, alokasi anggaran untuk pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara anggaran kesehatan dapat memperpanjang harapan hidup masyarakat dan meningkatkan produktivitas nasional. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya yang dibiayai oleh anggaran negara juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan fiskal memiliki posisi yang sangat penting karena masih banyak tantangan sosial-ekonomi yang harus diatasi, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di beberapa wilayah. Pemerintah perlu merancang kebijakan fiskal yang responsif, inklusif, dan tepat sasaran agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini, belanja negara yang efektif harus mampu menjangkau masyarakat miskin, daerah tertinggal, serta kelompok rentan agar tercipta pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Selain berperan dalam pembangunan sosial, kebijakan fiskal juga memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika terjadi perlambatan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran negara untuk mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, ketika inflasi meningkat, pemerintah dapat mengatur pajak atau mengurangi pengeluaran tertentu untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat stabilisasi yang membantu negara menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik.

Namun, pelaksanaan kebijakan fiskal tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, praktik penghindaran pajak, korupsi, inefisiensi anggaran, serta distribusi bantuan sosial yang kurang tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada utang negara untuk menutupi defisit anggaran juga dapat menjadi risiko jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Perkembangan era globalisasi dan digitalisasi juga membawa tantangan sekaligus peluang baru dalam implementasi kebijakan fiskal. Digitalisasi sistem perpajakan, efisiensi belanja negara, serta pemanfaatan teknologi dalam distribusi bantuan sosial dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal. Di sisi lain, perubahan ekonomi global, krisis keuangan, pandemi, dan ketidakpastian pasar internasional menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kebijakan fiskal bukan hanya sekadar alat untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, pengentasan

kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai peran kebijakan fiskal sangat penting agar masyarakat dapat menyadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari pengelolaan fiskal yang efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, negara dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat sekaligus menciptakan masyarakat yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan fiskal, serta publikasi dari lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial.

Dalam penelitian kepustakaan, peneliti menggunakan berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel untuk mendapatkan data. Akibatnya, proses pemilihan sumber dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kualitas publikasi, kesesuaian tema, dan kebaruan informasi yang digunakan. Sumber-sumber yang dipilih sebagian besar berasal dari buku akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, penulis melakukan perbandingan dan analisis berbagai temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang dibahas. Dalam proses ini, mereka mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan kebijakan fiskal berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan evolusi penelitian mengenai kebijakan fiskal.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan penelaahan berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan menjelaskan informasi yang diperoleh untuk menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga

diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui penerapan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini melibatkan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pengelolaan utang untuk mempengaruhi permintaan barang dan jasa, produksi, dan distribusi pendapatan dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal juga merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi kondisi perekonomian melalui pengaturan penerimaan negara dan pengeluaran negara. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial (Rahyono, 2023).

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program pemerintah yang didanai APBN (Fitriani, Herry, 2026).

Tujuan adanya kebijakan fiskal dalam pengelolaan ekonomi makro antara lain: 1) Menstabilkan Ekonomi: Melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara, kebijakan fiskal bertujuan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang serta jasa. 2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak, bertujuan meningkatkan investasi, konsumsi, dan produksi, sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi. 3) Mengurangi Pengangguran: Pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan membangun infrastruktur dan memberikan

subsidi kepada perusahaan swasta. 4) Mengendalikan Inflasi: Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi permintaan agregat dan mencegah inflasi dengan cara meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran negara. 5) Pemerataan Pendapatan: Kebijakan fiskal digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui redistribusi pendapatan dengan program sosial dan subsidi.

Jenis – Jenis Kebijakan Fiskal

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia menerapkan kedua jenis kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi. Pada masa krisis atau perlambatan ekonomi, kebijakan fiskal ekspansif digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, pada saat perekonomian mengalami tekanan inflasi, kebijakan fiskal kontraktif dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas harga dan keseimbangan ekonomi nasional (Fitriani, Herry, 2026).

Berdasarkan tujuannya, kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi beberapa jenis: 1) Kebijakan Fiskal Ekspansif: Digunakan ketika perekonomian mengalami resesi atau tingkat pengangguran tinggi. Pemerintah akan meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong permintaan agregat dan meningkatkan lapangan pekerjaan. 2) Kebijakan Fiskal Kontraktif: Digunakan untuk mengatasi inflasi, kebijakan ini melibatkan pengurangan pengeluaran negara atau peningkatan pajak untuk menurunkan permintaan agregat dan menekan harga. 3) Kebijakan Fiskal Surplus: Saat pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kebijakan ini digunakan untuk menekan inflasi, dengan cara menahan pengeluaran negara. 4) Kebijakan Fiskal Defisit: Saat pengeluaran lebih besar dari pendapatan, yang sering kali dilakukan untuk mendanai proyek pembangunan atau menghadapi krisis ekonomi.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 Pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut membahas tentang fungsi kebijakan fiskal yang terdiri dari 6 bagian.

Fungsi Otoritas: Fungsi kebijakan fiskal yang pertama adalah fungsi otoritas. Hal ini berarti kebijakan fiskal hanya akan berfungsi saat anggaran negara sudah jadi pedoman untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu.

Fungsi Perencanaan: Fungsi kebijakan fiskal yang kedua adalah fungsi perencanaan. Maknanya, kebijakan fiskal hanya akan berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar dalam perencanaan anggaran negara tahun tersebut.

Fungsi Pengawasan: Fungsi kebijakan fiskal yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Hal ini berarti kebijakan fiskal berfungsi sebagai pengawas dari masuknya pendapatan negara, serta pengawasan atas pemanfaatan dari pendapat tersebut.

Fungsi Alokasi: Fungsi kebijakan fiskal yang berikutnya adalah fungsi alokasi. Kebijakan fiskal hanya akan berfungsi saat anggaran negara dialokasikan dengan baik sebagai cara untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya.

Fungsi Stabilisasi: Fungsi kebijakan fiskal yang kelima adalah fungsi stabilisasi. Hal ini bermakna bahwa kebijakan fiskal akan berfungsi saat anggaran negara dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut.

Fungsi Distribusi: Fungsi kebijakan fiskal yang terakhir adalah fungsi distribusi. Artinya adalah kebijakan fiskal akan berfungsi saat negara membagi pendapatan negara untuk anggaran yang telah direncanakan secara merata pada setiap lapisan aspek kehidupan di negara tersebut.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi kehidupan masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta akses terhadap peluang ekonomi yang adil. Menurut Sen (1999), kesejahteraan sosial dapat dilihat dari kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Di Indonesia, tujuan utama dari kebijakan pembangunan sosial adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi, memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata (Rahyono, 2023).

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemasukan negara dan wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Aqmarina & Furqon, 2020).

Peran Pajak Dalam Kebijakan Fiskal

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Semakin optimal penerimaan pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fauziyah, 2023).

Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga memiliki fungsi regulasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan aktivitas ekonomi, meningkatkan investasi, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global (Oktaviana & Peradaban, 2025). Penyokong Dalam Negeri: Pajak membantu meningkatkan perekonomian melalui penyesuaian tarif pajak. Fungsi Regulerend: Pajak memberikan stimulus untuk kegiatan perekonomian dan investasi. Menyelamatkan Perekonomian: Mengatasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Sumber Penerimaan Negara: Menyediakan dana untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Pemerataan Pendapatan: Redistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke miskin.

Mekanisme Pajak Dalam Kebijakan Fiskal

Pajak – Penerimaan Negara – APBN – Alokasi Anggaran

Penjelasan :

Pembangunan Infrastruktur (Fungsi Alokasi)

Program Bantuan Sosial dan Subsidi (Fungsi Distribusi)

Stabilitas Ekonomi (Fungsi Stabilisasi)

Regulasi Ekonomi (Fungsi Regulasi)

Pembangunan Nasional dalam Kebijakan Fiskal

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional karena menjadi sumber penerimaan utama negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Zakka Pranggapati Janges & Ilham Aji Pangestu, 2021)

Selama dua dekade terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif kuat di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Krisis keuangan global, pandemi COVID-19, hingga gejolak harga komoditas dan geopolitik dunia menjadi ujian nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Di tengah berbagai tekanan tersebut, kebijakan fiskal berperan sebagai jangkar utama (*anchor policy*) yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat(Rusiadi. E & Sari, 2020).

Kebijakan fiskal bukan sekadar instrumen anggaran, tetapi menjadi alat strategis pemerintah untuk menata ulang fondasi kemandirian ekonomi nasional, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, memperkuat daya tahan fiskal, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia(Fitriani, Herry, 2026).

Peran kebijakan fiskal dalam pembangunan nasional antara lain terdiri dari beberapa aspek, antara lain yaitu:

APBN Sebagai Instrumen Stabilisasi dan Transformasi Ekonomi

Sebagai bentuk nyata kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi (Hali et al., 2025). Melalui pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan negara, pemerintah mampu meredam gejolak ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Transformasi fungsi juga APBN terlihat jelas pada pergeseran dari belanja konsumtif menuju produktif—di mana anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, digitalisasi layanan publik, serta riset dan inovasi. Dengan begitu, kebijakan fiskal tidak hanya menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi untuk kemandirian ekonomi jangka panjang.

Optimalisasi Pendapatan Negara dan Kemandirian Fiskal

Kemandirian ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa kemandirian fiskal. Pemerintah terus memperkuat sisi penerimaan melalui reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta digitalisasi sistem perpajakan seperti *Core Tax Administration System* (CTAS). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan *tax ratio* dan mengurangi ketergantungan terhadap utang.

Di sisi lain, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga diarahkan untuk mendorong kontribusi sektor-sektor strategis, seperti pertambangan, kehutanan, dan layanan publik. Diversifikasi sumber penerimaan menjadikan APBN lebih tangguh menghadapi fluktuasi ekonomi global.

Kebijakan pengelolaan utang yang *prudent* (hati-hati) menjadi bagian penting dari disiplin fiskal. Pemerintah menjaga rasio utang terhadap PDB tetap terkendali sambil memastikan utang digunakan untuk kegiatan produktif, seperti infrastruktur dan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan fiskal berperan ganda: menjaga stabilitas makro sekaligus memperkuat kapasitas jangka panjang.

Belanja Negara yang Inklusif dan Produktif

Peran belanja negara kini semakin diarahkan untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Program perlindungan sosial (seperti bantuan langsung tunai, PKH, dan Kartu Prakerja) memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga saat tekanan ekonomi meningkat. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) berfungsi memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah (Khusaini et al., 2024).

Selain itu, alokasi belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi pilar utama dalam menciptakan produktivitas nasional. Pembangunan infrastruktur yang merata memperlancar arus barang dan jasa, sedangkan peningkatan kualitas SDM menjamin daya saing bangsa. Kombinasi keduanya membentuk siklus positif menuju kemandirian ekonomi nasional.

Pemerataan Ekonomi Dalam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memegang peran penting dalam upaya mencapai pemerataan ekonomi. Melalui berbagai instrumennya, kebijakan fiskal dapat mengatasi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Rahyono, 2023).

Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah terciptanya distribusi pendapatan yang adil. Melalui pengelolaan APBN yang tepat serta dukungan instrumen fiskal berbasis syariah, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Tri Inda Fadhila, 2021)

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk tujuan ini adalah kebijakan fiskal ekspansioner atau kebijakan untuk meningkatkan belanja pemerintah dan atau menurunkan pajak.

Pemerataan ekonomi menjadi isu krusial yang perlu kita perhatikan bersama. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan fiskal berperan penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kebijakan fiskal yang berorientasi pada sektor sosial memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Melalui alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, dan subsidi, kebijakan fiskal dapat: Mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan sosial tertarget, mengurangi kesenjangan melalui sistem pajak progresif, meningkatkan produktivitas melalui investasi pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur, mendorong pemerataan melalui transfer ke daerah.

Kebijakan fiskal adalah solusi ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, namun diperlukan peningkatan pengawasan, transparansi, dan inklusivitas dalam implementasi agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa et al. (2025). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Inklusif. JEKP.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255–274. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>
- COSTING Journal (2023). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
- Fauziyah, N. (2023). Peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi Nasional. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 2(12), 755–762. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Fitriani, Herry, A. (2026). *Jurnal Ekonomika Transformasi Paradigma Fiskal Indonesia*. 16(3), 447–460.
- Hali, A., Sadih, H., Dewi, Z. D., Syahputra, M. Z., Desilva, V., & Nuraya, A. S. (2025). Digitalisasi QRIS, BI-Fast, dan APBN dalam Mendukung Kebijakan Moneter dan Fiskal Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 4(1), 258–266. <https://doi.org/10.47233/jemb.v4i1.2937>
- Kementerian Keuangan RI. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mewujudkan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Nasional.
- Khusaini, K., Mardisentosa, B., & Putro, T. R. (2024). Fiscal Transfer Policies and Road Infrastructure Reduce Income Inequality in Rural-Urban Areas. *Etikonomi*, 22(2), 333–356. <https://doi.org/10.15408/etk.v22i2.28618>
- Oktaviana, C., & Peradaban, U. (2025). Jurnal Inovasi Manajemen dan Kewirausahaan Jurnal Inovasi Manajemen dan Kewirausahaan. *STIE Mahardika*, 6(4), 326–340.
- Pusko Media Indonesia. (2026). Kebijakan Fiskal Cemerlang: Kunci Pemerataan Ekonomi yang Makin Gemilang. Tayem Kabupaten Cilacap
- Ragam Info. (2023). 6 Fungsi Kebijakan Fiskal dan Contohnya dalam Perekonomian Indonesia.
- Rahyono. (2023). the Impact of Fiscal Policy on Improving Social Welfare in Indonesia. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 2815–2828.
- Rusiadi. E., & Sari, W. I. (2020). Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 90.
- Tri Inda Fadhila, N. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8692–8702.
- Universitas Islam An-Nur Lampung. (2024). Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, Jenis, dan Contoh.
- Zakka Pranggapati Janges, & Ilham Aji Pangestu. (2021). Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum*, 17(1), 43–54. <https://doi.org/10.2307/299558.3>